

Nomor : 41/VIII/2026/BPP.PT
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Juli 2026

KepadaYth,
Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua
Di-
Jayapura

Surat Pengantar

1. Berdasar:
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Papua
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 Tentang OTK BPP Sesuai Pasal 2 Dan 3 Tugas Dan Fungsi BP3OKP.
2. Berikut Ini Kami Menyampaikan Laporan Kegiatan Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Tengah Bulan Juli 2026.

Demikian Kami Sampaikan Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan banyak terimakasih.

Nabire, 05 Agustus 2026
Anggota Kelompok Kerja BP3OKP
Provinsi Papua Tengah

**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
(BP3OKP)**

**SEKRETARIAT
BP3OKP NABIRE**
IRJEN POL (P) DRS. PIETRUS WAINE, S.H., M.HUM





BPP

LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT

BULAN JULI 2026

BADAN PENGARAH PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH



**LAPORAN KEGIATAN PAPUA SEHAT
RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH (RAKESKESDAS) KE-I DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026
(1 – 4 JULI 2026)**

A. Latar Belakang dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh perlunya evaluasi terhadap capaian kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan pelaksanaan program kesehatan Tahun 2026, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan Dana KO Sehat, kondisi sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan serta pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, sistem pelaporan pelayanan kesehatan, dan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Maksud dilaksanakannya Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDAS) Ke-I Tahun 2026 adalah sebagai wadah koordinasi, evaluasi, dan sinkronisasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah.



Tujuan kegiatan ini Mengevaluasi capaian kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 serta pelaksanaan program kesehatan Tahun 2026, Membahas pengelolaan dan pemanfaatan Dana KO Sehat, termasuk pembagian dana KO Sehat untuk RSUD se-Papua Tengah, Mengidentifikasi capaian, kendala, dan permasalahan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sistem pelaporan, Mendorong pemutakhiran data kondisi gedung dan alat kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit melalui aplikasi yang telah ditentukan, Mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan, Memperkuat sistem rujukan berjenjang dari Puskesmas, Rumah Sakit, hingga Rumah Sakit Rujukan Lanjutan, Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan sistem klaim BPJS Kesehatan, Menyusun langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1-4 Juli 2026 di puncak jaya Provinsi Papua Tengah

C. Peserta

Kegiatan ini dihadiri oleh Seluruh perwakilan dinas kesehatan yang ada di provinsi papua tengah yang ada di 8 kabupaten.

D. Hasil Yang di Capai

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDAS) Ke-I Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 antara lain :

1. Diperoleh gambaran mengenai capaian kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 serta pelaksanaan program kesehatan pada Tahun 2026.
2. Teridentifikasi berbagai kendala dan permasalahan pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit, khususnya terkait sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaporan.

3. Diperoleh pemahaman mengenai pengelolaan Dana KO Sehat serta pemanfaatannya untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pembiayaan pasien rujukan.
4. Disepakati perlunya pendataan ulang kondisi gedung dan alat kesehatan pada seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit serta melakukan penginputan data melalui aplikasi ASPAK.
5. Setiap Kabupaten didorong untuk melengkapi data alat kesehatan melalui sistem atau aplikasi yang telah ditentukan.
6. Diperkuat komitmen untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis, dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki akun Satu Sehat.
7. Didorong pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan wajib di Puskesmas dan tenaga spesialis dasar di Rumah Sakit.
8. Diperkuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan melalui aplikasi Rembut untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2031.
9. Diperkuat sistem rujukan berjenjang melalui penyusunan dan penerapan SOP sistem rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit.
10. Didorong peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit dalam pelaksanaan rujukan pasien serta pemanfaatan Dana KO Sehat.
11. Didorong pengaktifan kepesertaan BPJS bagi masyarakat yang belum aktif sebagai upaya mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
12. Disepakati perlunya pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mendukung penanganan kasus kesehatan secara cepat dan terkoordinasi.
13. Disepakati perlunya penyediaan hotline 24 jam dan penetapan PIC pada masing-masing Kabupaten untuk mendukung koordinasi Tim Gerak Cepat.
14. Diperlukan pelaporan kasus secara berkala kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan pemantauan pelayanan kesehatan.
15. Dilakukan pembahasan terkait revisi petunjuk teknis (Juknis) KO Sehat agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kendala yang ditemukan di tempat pelayanan.

E. Rencana Tindak Lanjut

1. Fasilitas

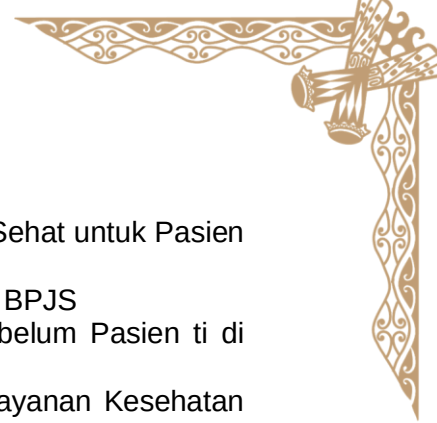
- seluruh puskesmas dan Rumah sakit wajib mendata Ulang Kondisi gedung, alat Kesehatan, lalu Menginput di dalam Aplikasi ASPAK.
- Setiap Kabupaten Wajib Melengkapi Data alat Kesehatan Melalui Shopi Siren, Impus

2. Tenaga Kesehatan

- Semua Nakes dan Named dan tenaga Penunjang di Fasyankes Memiliki akun Satu sehat
- Kabupaten segera Melengkapi Kekurangan Tenaga 9 tenaga Kesehatan Wajib di puskesmas dan 7 spesialis Dasar di Rumah Sakit
- Kabupaten segera menyelesaikan perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Melalui Aplikasi Rembut tahun 2026 sampai dengan tahun 2031.

3. Sistem Rujukan

- Setiap Kabupaten Wajib Mempunyai SOP Sistem Rujukan Berjenjang Puskesmas, Rumah Sakit,



- Dinkes Kabupaten dan RSUD wajib Memanfaatkan Dana Ko Harus Sehat untuk Pasien Rujukan berjenjang.
- Dinkes Kabupaten Mengaktifkan Warga Masyarakat yang belum aktif BPJS
- Dinas Kesehatan Kabupaten dan RSUD Melakukan Koordinasi Sebelum Pasien ti di RSUD, untuk Tindakan lebih Lanjut
- Dana Ko Harus Sehat akan di Transfer ke Rumah Sakit Untuk pelayanan Kesehatan Rujukan untuk Masyarakat.dan wajib Membuat Laporan Kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan 8 kabupaten Membuat Tim Gerak Cepat (TGC)
 1. Tim terdiri dari dokter Perawat, Sopir dan Logistik
 2. Masing- Masing Kabupaten Mempunyai Hotline 24 Jam
 3. Nama – Nama PIC di laporkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah
 4. Tim Gerak Cepat Wajib Melaporkan Kasus Perhari dan Per Bulan Ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada Jam 18,00 wit
- Pembahasan dan revisi Juknis KO sehat sesuai kendala di tempat pelayanan

**LAPORAN POKJA PAPUA SEHAT
KEGIATAN SHEK TINDAK LANJUT HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA
(13 JULI 2026)**

A. Latar Belakang dan Tujuan

Pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta keluarga merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Untuk memastikan pelayanan diberikan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir pelayanan yang jelas serta terdokumentasi dengan baik. Dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan dan persiapan serta tindak lanjut proses akreditasi rumah sakit, telah dilaksanakan kegiatan SHEK yang membahas dan mereviu SOP serta formulir terkait hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Kegiatan ini juga mencakup sosialisasi kepada tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya serta monitoring awal terhadap penerapan SOP dan kelengkapan dokumentasi.



Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan penerapan SOP dan pemenuhan hak serta kewajiban pasien dan keluarga dapat dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit pelayanan rumah sakit. Kegiatan ini Bertujuan Mereview dan menyempurnakan SOP serta formulir terkait hak dan kewajiban pasien dan keluarga,Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai hak dan kewajiban pasien,Meningkatkan kepatuhan petugas dalam pelaksanaan SOP dan kelengkapan dokumentasi, dan Memastikan pasien memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelayanan dan tindakan medis.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di deiyai 13 juli 2026 di RSUD Deiyai

C. Peserta

Para perawat, tenaga kesehatan rumah sakit RSUD Deiyai

D. Hasil Yang Dicapai

Kegiatan SHEK terkait tindak lanjut hak dan kewajiban pasien dan keluarga telah terlaksana dengan baik melalui reviu dan pembaruan SOP serta formulir pelayanan. Sosialisasi kepada tenaga kesehatan juga telah dilakukan dan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dalam penerapan SOP serta kelengkapan dokumentasi. Meskipun demikian, diperlukan monitoring dan pembinaan secara berkelanjutan agar pemenuhan hak pasien dan penerapan SOP dapat dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit pelayanan.



E. Rencana Tindak Lanjut

Setelah terakreditasi, rumah sakit mampu implementasi di unit pelayanan yaitu :

1. Memastikan pemenuhan hak pasien dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit pelayanan.
2. Memastikan pasien dan keluarga memperoleh informasi yang lengkap mengenai diagnosis, rencana tindakan, risiko, manfaat, dan alternatif terapi.
3. Menjamin penghormatan terhadap nilai budaya, agama, dan keyakinan pasien.

LAPORAN POKJA PAPUA SEHAT RAPAT SHEK BPP POKJA PAPUA SEHAT DENGAN KELOMPOK SWADAYA OAP (16 JULI 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

Kegiatan rapat dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terkait pengelolaan dan pengolahan sampah di Provinsi Papua Tengah, khususnya mengenai kebutuhan alat pengelolaan sampah serta peran Kelompok Swadaya OAP dalam mendukung kebersihan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan Menyusun strategi pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Mendorong adanya regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Membangun koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah, Membahas mekanisme pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dan operasional persampahan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mendorong tersedianya dukungan anggaran, sarana, prasarana, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah,



Meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendampingan, Menentukan lokasi serta menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan program pengelolaan sampah, Mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan di daerah.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat badan pengarah papua tengah pada tanggal 16 juli 2026

C. Peserta

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah kelompok swadaya OAP bersama pokja papua sehat dan papua produktif dan polhukam.

D. Hasil Yang Dicapai

Kegiatan rapat menghasilkan kesepahaman bahwa pengelolaan sampah perlu diperkuat melalui koordinasi lintas pihak, dukungan sarana dan prasarana, serta pelibatan Kelompok Swadaya OAP. Diharapkan langkah tersebut dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan sekaligus membuka peluang pemberdayaan dan keterlibatan OAP dalam sektor kebersihan di Provinsi Papua Tengah.

E. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut, BP3OKP Pokja Papua Sehat dan Produktif akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat respons terhadap proposal bantuan alat pengelolaan sampah. Selain itu, BP3OKP akan memfasilitasi forum diskusi bersama Kelompok Swadaya OAP, Dinas Lingkungan Hidup, dan DPR Provinsi Papua Tengah guna membahas penguatan sistem pengelolaan sampah dan peluang pelibatan OAP dalam pengelolaan kebersihan di daerah.

LAPORAN POKJA PAPUA SEHAT DENGAN KEPALA SEKOLAH SMK DI KABUPATEN DEIYAI, DISTRIK TIGI BARAT TENTANG KOLABORASI PENANGANAN HIV/AIDS DI TINGKAT SEKOLAH, DESA, DAN PUSKEMAS (31 JULI 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

HIV/AIDS merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara bersama-sama melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sektor pendidikan, pemerintah desa, sekolah, puskesmas, serta masyarakat. Sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai HIV/AIDS, termasuk pencegahan, deteksi dini, serta pentingnya menjaga kesehatan. Di sisi lain, puskesmas memiliki peran dalam menyediakan layanan kesehatan, pemeriksaan, konseling, dan penanganan yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Pemerintah desa juga memiliki peran dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di lingkungan masyarakat.



Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara BP3OKP Pokja Papua Sehat, pihak sekolah, pemerintah desa, dan puskesmas dalam mendukung upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, serta penanganan HIV/AIDS secara terpadu di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan Meningkatkan koordinasi antara BP3OKP Pokja Papua Sehat, sekolah, pemerintah desa, dan puskesmas dalam penanganan HIV/AIDS, Mendorong peningkatan edukasi dan kesadaran siswa serta masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS, Mendorong upaya deteksi dini dan akses terhadap layanan kesehatan terkait HIV/AIDS, Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS, Membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan di RSUD Deiyai pada tanggal 31 juli agustus 2026

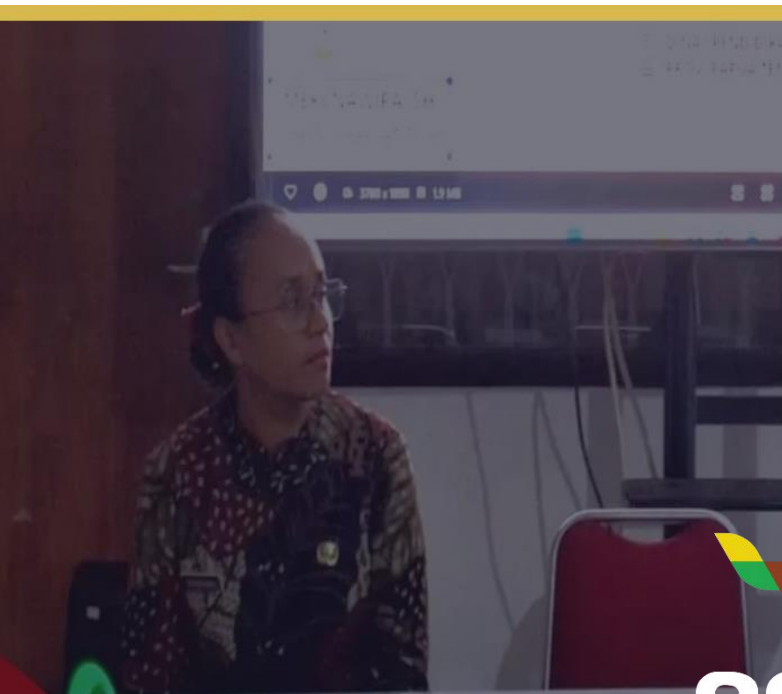
C. Peserta

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala sekolah smk dan kordinator Pokja Papua Sehat

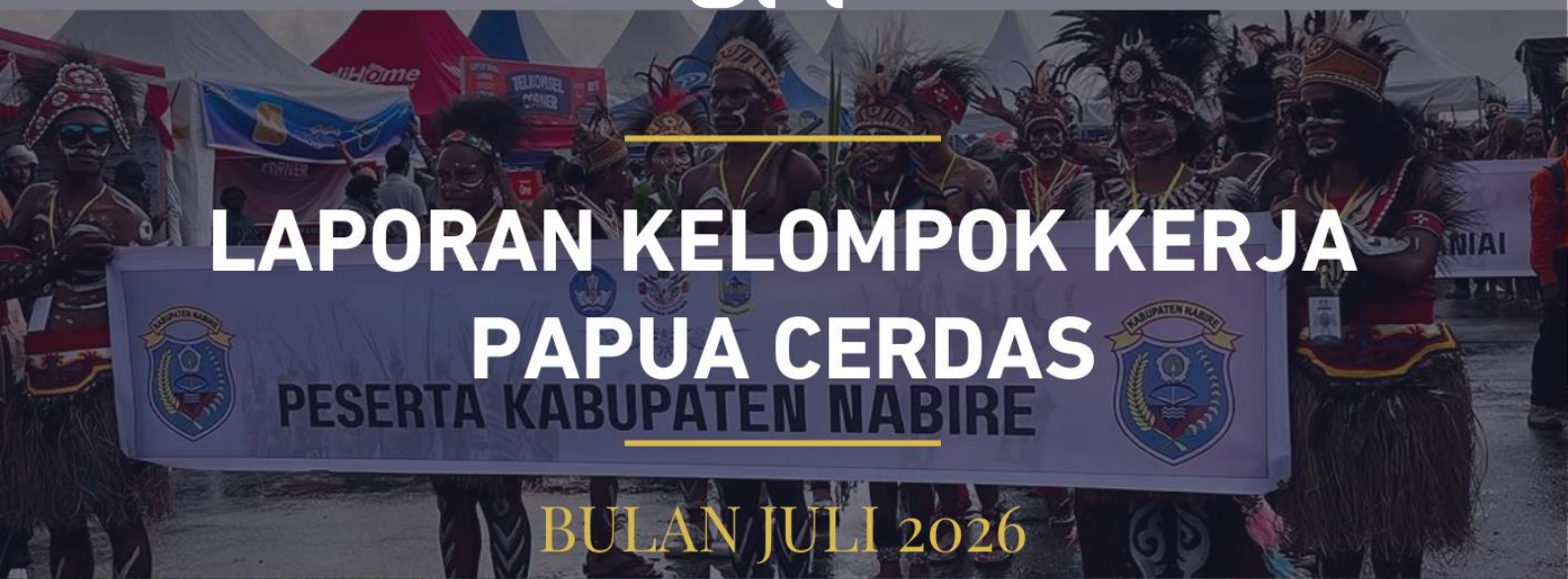
D. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari kegiatan rapat antara lain :

1. Terbangunnya koordinasi awal antara BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan pihak sekolah dalam mendukung program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.
2. Adanya pemahaman bersama mengenai pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah desa, dan puskesmas.
3. Perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai HIV/AIDS kepada siswa dan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Perlunya penguatan upaya deteksi dini dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terkait HIV/AIDS.
5. Adanya perhatian terhadap pentingnya pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS.
6. Teridentifikasinya kebutuhan untuk membangun komitmen bersama dan menyusun rencana tindak lanjut yang terintegrasi.
7. Diharapkan terbentuknya pola kerja sama yang berkelanjutan antara pihak sekolah, pemerintah desa, puskesmas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan HIV/AIDS.




BPP



LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS PESERTA KABUPATEN NABIRE

BULAN JULI 2026

**BADAN PENGARAH PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH**



A. Latar Belakang dan Tujuan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Namun, dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau, masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi geografis yang luas dan sulit, keterbatasan akses transportasi, serta belum meratanya ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Papua Tengah, sehingga generasi muda di daerah 3T dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah menuju Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 juli 2026 melalui zoom meeting

C. Peserta

Kegiatan ini di hadiri oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi papua tengah dan Sekolah 3T

D. Hasil Yang di capai

Pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, kegiatan ini berhasil :

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak
- Memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dan berpartisipasi
- Mempererat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA CERDAS MENGHADIRI UNDANGAN KEGITAN HARI ANAK NASIONAL OLEH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA TENGAH DI SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE (23 JULI 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Peringatan ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperingati Hari Anak Nasional serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Adapun tujuan kegiatan ini, Meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak, Mendorong partisipasi anak dalam pembangunan, Memberikan ruang ekspresi dan kreativitas bagi anak-anak, Membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan ramah anak.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tgl : Kamis, 23 Juli 2026

Waktu : 09.00- selesai

Tempat : SMA 1 Negeri KPG Nabire

C. Peserta

Kegiatan ini di hadiri oleh :

- Anggota BP3OKP Papua Tengah (Pokja Cerdas, Prosuktif, Damai)
- DPRPT diwakili oleh Ketua Komisi V DPRPT
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah
- kepala dinas pemberdayaan perempuan, anak dan BKKBN
- Yayasan SAPA dan Mutiara Hitam, lembaga kursus bahasa inggris
- Kepala Sekolah, Guru, dan siswa peserta kursus bahasa inggris dari 6 Kabupaten
- staf dinas pendidikan kebudayaan dan pemberdayaan perempuan dan anak papua tengah

D. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, kegiatan ini berhasil :

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak
- Memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dan berpartisipasi
- Mempererat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

LAPORAN KERJA PAPUA CERDAS, FESTIVAL CAHAYA KREASI BUDAYA PELAJAR PROVINSI PAPUA TENGAH (24-27 JULI TAHUN 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

Provinsi Papua Tengah memiliki kekayaan seni dan budaya yang beragam sebagai bagian dari identitas dan jati diri masyarakat Papua. Keberagaman budaya tersebut perlu terus dilestarikan dan dikembangkan, khususnya melalui keterlibatan generasi muda sebagai penerus kebudayaan daerah. Dalam rangka memberikan ruang bagi pelajar untuk mengenal, mengembangkan, dan mengekspresikan potensi seni dan budaya daerah, diselenggarakan Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Kabupaten Nabire. Kegiatan Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai wadah bagi pelajar untuk menyalurkan kreativitas, bakat, dan potensi dalam bidang seni dan budaya sekaligus sebagai sarana pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah Papua Tengah. Kegiatan ini bertujuan Melestarikan dan mengembangkan seni serta budaya lokal Papua Tengah, Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan pelajar terhadap budaya daerah, Memberikan ruang kepada pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan bakat seni, Meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan antarpelajar dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Memperkenalkan keberagaman budaya Papua Tengah kepada generasi muda, Mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah, Membentuk generasi muda yang kreatif, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap kebudayaan daerah.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : 24–27 Juni 2026
Tempa : Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah
Nama Kegiatan: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Provinsi Papua Tengah Tahun 2026
Peserta : 160 pelajar tingkat SMA dan SMK dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

C. Peserta

- Pelajar tingkat SMA dan SMK dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 160 pelajar.
- Guru atau pendamping sekolah yang mendampingi peserta selama kegiatan.
- Panitia dan penyelenggara kegiatan.
- Perwakilan pemerintah daerah dan instansi terkait.
- Tokoh seni dan budaya serta pihak lain yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

D. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Terlaksananya Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Kabupaten Nabire pada tanggal 24–27 Juni 2026.
- Kegiatan diikuti oleh 160 pelajar tingkat SMA dan SMK dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
- Tersedianya ruang bagi pelajar untuk menampilkan kreativitas, bakat, dan potensi seni budaya.
- Meningkatnya interaksi dan kebersamaan antarpelajar dari berbagai kabupaten di Papua Tengah.
- Tumbuhnya rasa bangga dan kecintaan pelajar terhadap seni dan budaya daerah.
- Meningkatnya kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya Papua.
- Terjalannya hubungan dan semangat persatuan antarpelajar melalui kegiatan seni dan budaya.
- Kegiatan menjadi sarana untuk memperkenalkan dan memperkuat keberagaman budaya Papua Tengah di kalangan generasi muda.





BPP

LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF

BULAN JULI 2026

**BADAN PENGARAH PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH**



1. Pendampingan Pengembangan Unit Produksi SMKS YPPK Santo Yohanes Pembaptis Gaiyabi Kabupaten Deiyai (1 Juli 2026)**A. Latar belakang**

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Tengah serta untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing, salah satu strategi yang ditempuh adalah penguatan pendidikan vokasi melalui pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja maupun dunia usaha. Selain menghasilkan tenaga kerja terampil, SMK diharapkan mampu mengembangkan unit produksi sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik (Teaching Factory/TEFA) sehingga



peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam mengelola suatu usaha produktif. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) mengembangkan program SMK Terintegrasi BLK, Komunitas LKP, dan PKBM. Program ini bertujuan menghasilkan produk yang berbasis pada potensi unggulan daerah sekaligus meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu berwirausaha setelah menyelesaikan pendidikan. Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor peternakan. Kondisi geografis, kebutuhan masyarakat terhadap produk peternakan, serta pengalaman masyarakat dalam memelihara ternak menjadi modal penting untuk mengembangkan unit produksi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu diperlukan pemetaan potensi, identifikasi kebutuhan, serta penyusunan model pengelolaan unit produksi yang sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas memberikan pertimbangan strategis dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP turut berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk memberikan masukan, membangun koordinasi lintas sektor, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan instansi teknis agar pengembangan unit produksi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan vokasi maupun kesejahteraan masyarakat.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan rencana pengembangan unit produksi peternakan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2026 pada pukul 10.00 s/d 13.30 WIT. Rapat ini bertempat di Ruang Kelas SMKS YPPK Santo Yohanis Pembaptis Gaiyabi, Kabupaten Deiyai.

C. Peserta

Peserta yang hadir pada saat pertemuan diantaranya Ketua BP3OKP Papua Tengah, Perwakilan Pokja Produktif, Tim Pendamping LPKIPI, Kepala Sekolah SMKS, Ketua Komite, Guru, Sekretaris Distrik Tigi Barat dan Anggota masyarakat.

D. Hasil Yang Dicapai

Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara BP3OKP Provinsi Papua Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, LPKIPI, yayasan, pihak sekolah, tim ahli, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan unit produksi berbasis potensi lokal pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Disamping itu terpetakan potensi dan kondisi sekolah dalam menentukan jenis unit usaha sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi SDA dan kebutuhan masyarakat setempat.



Berdasarkan hal tersebut maka SMKS YPPK Santo Yohanes Pembaptis Gaiyabi Kabupaten Deiyai disepakati bahwa unit produksi peternakan babi merupakan usaha yang paling sesuai untuk dikembangkan. Hal ini didasarkan pada pengalaman masyarakat dalam beternak babi, tingginya nilai ekonomi ternak babi, serta dukungan sekolah untuk melanjutkan program tersebut dengan perbaikan sistem pengelolaan dan pengendalian penyakit ternak.

2. Pendampingan Pengembangan Unit Produksi SMKS YPPGI Yehezkiel Dumapaldakebo Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah (2 Juli 2026)

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Tengah serta untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing, salah satu strategi yang ditempuh adalah penguatan pendidikan vokasi melalui pengembangan



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan

dunia kerja maupun dunia usaha. Selain menghasilkan tenaga kerja terampil, SMK diharapkan mampu mengembangkan unit produksi sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik (Teaching Factory/TEFA) sehingga peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam mengelola suatu usaha produktif. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) mengembangkan program SMK Terintegrasi BLK, Komunitas LKP, dan PKBM. Program ini bertujuan menghasilkan produk yang berbasis pada potensi unggulan daerah sekaligus

meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu berwirausaha setelah menyelesaikan pendidikan. Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor peternakan. Kondisi geografis, kebutuhan masyarakat terhadap produk peternakan, serta pengalaman masyarakat dalam memelihara ternak menjadi modal penting untuk mengembangkan unit produksi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu diperlukan pemetaan potensi, identifikasi kebutuhan, serta penyusunan model pengelolaan unit produksi yang sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas memberikan pertimbangan strategis dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP turut berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk memberikan masukan, membangun koordinasi lintas sektor, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan instansi teknis agar pengembangan unit produksi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan vokasi maupun kesejahteraan masyarakat.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan hari kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Juli 2026 pada pukul 11.00 s/d 14.00 WIT bertempat di Ruang Kelas SMKS YPPGI Jehezkiel Dumapaldakebo Kabupaten Dogiyai.

C. Peserta

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua BP3OKP Papua Tengah, Perwakilan Pokja Produktif, Pendamping LPKIP, Kepala Sekolah SMKS, Ketua Jurusan, Guru kelas, Guru Jurusan ATPH, Ketua YPPGI, Penjaga Sekolah dan beberapa Siswa SMKS.

D. Hasil Yang Dicapai

Terbangunnya koordinasi dan sinergi antara BP3OKP Provinsi Papua Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, LPKIP, yayasan, pihak sekolah, tim ahli, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan unit produksi berbasis potensi lokal pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Disamping itu terpetakan potensi dan kondisi sekolah dalam menentukan jenis unit usaha sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi SDA dan kebutuhan masyarakat setempat. Pada SMKS YPPGI Jehezkiel Dumapaldakebo Kabupaten Dogiyai, diperoleh kesepakatan bahwa peternakan ayam petelur dan ayam pedaging memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai unit produksi sekolah. Hal tersebut didukung oleh pengalaman sekolah dalam mengelola peternakan ayam, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap daging dan telur ayam, serta adanya peluang pengembangan usaha secara berkelanjutan.

3. Rapat SHEK BP3OKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. (7 Juli 2026)

A. Latar Belakang

Provinsi Papua Tengah memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, didukung oleh wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, serta sumber daya perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Potensi tersebut menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat Papua Tengah. Sejalan dengan Kebijakan Daerah dan Sesuai dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah telah menetapkan berbagai program prioritas Tahun Anggaran 2026 yang diarahkan pada peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan, rehabilitasi fasilitas pendukung seperti coldstorage dan pabrik es, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, pengelolaan ruang laut, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS) di Provinsi Papua Tengah dan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan, masukan strategis, serta melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tengah, BP3OKP memandang perlu untuk membangun sinergi dan koordinasi yang lebih erat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Melalui koordinasi ini diharapkan tercipta keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta penguatan kolaborasi antar perangkat daerah dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, BP3OKP Provinsi Papua Tengah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan penguatan pelaksanaan program kerja Tahun 2026. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh kesamaan persepsi, teridentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, serta tersusun langkah-langkah strategis yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua Tengah.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat SHEK dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Juli 2026 pada pukul 10.30 s/d 13.00 WIT bertempat di Aula KPPN Nabire.



C. Peserta

Rapat ini dihadiri oleh Ketua BP3OKP, Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Cerdas, Pokja Polhukam, Plt.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Kabid.Tangkap, Kabid. PSDKP, Kabid.PRL-DKP Bagian UPTD DKP, Staf PPNPN BPP.

D. Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan hasil Rapat SHEK antara BP3OKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah maka terciptanya kesamaan persepsi antara BP3OKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam pengembangan potensi sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah melalui kegiatan teridentifikasi juga program prioritas DKP Papua Tengah diantaranya pengembangan pelabuhan perikanan, rehabilitasi coldstorage, rehabilitasi pabrik es, penyusunan rencana operasional pelabuhan, pembangunan dermaga, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. BP3OKP Papua Tengah mendukung kerja DKP Papua Tengah yang bertujuan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kepada pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Oleh sebab itu, sebagai lembaga Pengarah Percepatan Pembangunan OTSUS komitmen bersama DKP Papua Tengah akan memperkuat kolaborasi dalam mengawal proses pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Papua Tengah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mampu bersaing demi kemajuan ekonomi daerah serta berkelanjutan.



4. Rapat SHEK BP3OKP bersama Dinas Koperasi,UKM,Perindag Provinsi Papua Tengah. (8 Juli 2026)

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Tengah, diperlukan sinergi antar perangkat daerah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara terpadu, efektif, dan tepat

sasaran. BP3OKP sebagai lembaga yang memiliki fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Rapat ini dilaksanakan untuk menyelaraskan program pemberdayaan koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan industri kecil, serta peningkatan perdagangan yang berpihak kepada Orang Asli Papua sesuai amanat Otonomi Khusus.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat SHEK kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Juli 2026 pada pukul 10.00 s/d 13.30 WIT bertempat di Aula KPPN Nabire.

C. Peserta

Peserta yang hadir pada kegiatan ini diantaranya Ketua BP3OKP Papua Tengah, Pokja Papua Produktif, Pokja Polhukam, Kepala Dinas KUKM, Perindag Provinsi Papua Tengah, Kabid Koperasi dan UKM, Kabid Perdagangan, Kabid Perindustrian, Staf Dinas KUKM, Perindag, dan Staf PPNNP BPP.

D. Hasil Yang Dicapai

Adapun hasil yang diperoleh adalah BP3OKP mengetahui program kerja pada Dinas KUKM, Perindag Provinsi Papua Tengah dan melalui rapat bersama ini terlaksananya tugas dan fungsi SHEK BP3OKP terhadap pelaksanaan program kerja pada Dinas KUKM, Perindag disamping itu pertemuan ini memberikan gambaran yang jelas terhadap rencana kerja di bidang KUKM dalam pengembangan ekonomi di Provinsi Papua Tengah yang tentu saja akan menjadi pantauan BP3OKP dalam rangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus. Dinas KUKM, Perindag pun menginformasikan jumlah besaran dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan penyerapannya yang diperuntukkan bagi pendirian Koperasi OAP di 8 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua serta UMKM akan diprioritaskan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua dengan memperhatikan potensi unggulan masing-masing kabupaten. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan program kerja terutama dalam menangani kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas KUKM, Perindag maka BP3OKP akan terus memperkuat perannya melalui SHEK bersama Dinas KUKM, Perindag dan sektor lainnya sehingga mampu menjawab persoalan dilapangan guna percepatan pembangunan Otonomi Khusus (OTSUS) terutama yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).



5. Rapat SHEK BP3OKP bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah. (9 Juli 2026)

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor perkebunan dan peternakan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan di Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah memiliki berbagai komoditas unggulan dibidang perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, sagu serta komoditas peternakan berupa sapi, babi, dan unggas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Potensi tersebut perlu dikelola secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua.



Berdasarkan kondisi tersebut, BP3OKP Provinsi Papua Tengah melaksanakan Rapat SHEK kerja dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawalan, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program prioritas, capaian, kendala, serta kebutuhan dukungan dalam pengembangan sector perkebunan dan peternakan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara BP3OKP dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Papua.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat SHEK ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Juli 2026 pukul 11.00 s/d 15.00 yang bertempat di Aula KPPN Nabire.

C. Peserta

Rapat ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pokja Produktif dimana dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ketua BP3OKP, Pokja Papua Produktif, Pokja Polhukam, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah, Kabid. Perkebunan, Kabid. Peternakan, Kabid. Saprass Perkebunan, Kabid. P2HP, Kasie. Keswan, Staf Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Staf PPNPN BPP.

D. Hasil Yang Dicapai

Pelaksanaan kegiatan koordinasi kerja antara BP3OKP Provinsi Papua Tengah dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai informasi, masukan, serta rekomendasi strategis. Melalui kegiatan rapat ini BP3OKP memperoleh gambaran kondisi eksisting sektor perkebunan

dan peternakan, termasuk arah kebijakan pembangunan, program prioritas, potensi daerah, capaian pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah

Dalam pembahasan rapat ini teridentifikasi Program Prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah yang sedang dan akan dilaksanakan berupa pengembangan kawasan kopi melalui penyediaan sekitar 1,4 juta bibit kopi pada wilayah-wilayah potensial pengembangan pembibitan kakao dan kelapa, penataan kawasan sagu, penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta pengembangan peternakan babi dan sapi melalui penyediaan bibit ternak unggul dan pembangunan sarana pendukung. BP3OKP sebagai



badan pengarah pembangunan juga menyarakan agar dalam pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang didukung oleh penyediaan bibit unggul, pemetaan potensi wilayah, penguatan koperasi petani, peningkatan akses pasar, serta pengembangan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan Papua Tengah.

BP3OKP Provinsi Papua Tengah akan menghimpun seluruh hasil pembahasan, masukan dari rapat koordinasi untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor perkebunan dan peternakan. BP3OKP juga mendorong pengoptimalan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan sumber pendanaan lainnya secara efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan dan peternakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Undangan Peluncuran Program BANGKIT Papua Tengah (21 Juli 2026)

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama para pemangku kepentingan meluncurkan Program **Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh (BANGKIT) Papua Tengah**. Program ini merupakan upaya kolaboratif untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas generasi muda, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) diharapkan dapat menekan angka stunting serta meningkatkan gizi anak-anak Orang Asli Papua (OAP).



Sehubungan dengan hal tersebut, BP3OKP Provinsi Papua Tengah menghadiri undangan peluncuran Program BANGKIT sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Launching Program BANGKIT dilaksanakan pada tanggal 21 sJuli 2026 pukul 11.00 s/d 16.00 WIT bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah

C. Peserta

Launching Program BANGKIT Papua Tengah dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur Papua Tengah beserta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Perwakilan Kementerian / Lembaga terkait, BP3OKP Provinsi Papua Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya

D. Hasil Yang Dicapai

BP3OKP memperoleh informasi mengenai arah kebijakan, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan Program BANGKIT Papua Tengah, Fungsi SHEK terlaksana dengan baik dimana koordinasi dan komunikasi yang lebih baik terjalin antara BP3OKP dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan. Peluang sinergi Program BANGKIT dengan program-program pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) akan berjalan dengan baik jika ada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan keluarga di Papua Tengah

7. Pokja Papua Produktif melakukan SHEK bersama BGN Kabupaten Nabire (27 Juli 2026)

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), diperlukan sinergi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemenuhan gizi masyarakat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pokja Produktif BP3OKP bersama BGN Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) melalui kunjungan ke SPPG untuk memperoleh gambaran langsung mengenai tata kelola, mekanisme operasional, penyediaan bahan pangan, serta peluang keterlibatan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua, dalam mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan ke beberapa lokasi SPPG dilaksanakan pada hari Senin, 27 Juli 2026 dimulai dari 10.00 s/d 12.00 WIT. Lokasi pertama di SPPG Bumiwonorejo 001, Lokasi kedua di SPPG Girimulyo 004, dan Lokasi ketiga di SPPG Siriwini 002.

C. Peserta

Peserta yang terlibat dalam kunjungan diantaranya : Pokja Papua Produktif, Ketua BGN Kabupaten Nabire, Kepala SPPG Bumiwonorejo 001, Kepala SPPG Girimulyo 004,

Kepala SPPG Siriwini 002, Akuntan dan Relawan di SPPG Bumiwonorejo 001, Relawan di SPPG Girimulyo 004 dan SPPG Siriwini 002

D. Hasil Yang Dicapai

Dari hasil kunjungan di 3 SPPG SPPG telah melaksanakan pelayanan penyediaan makanan bergizi sesuai standar operasional yang ditetapkan dan sistem pengelolaan meliputi pengadaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi kepada sekolah - sekolah dan posyandu terjadwalkan disamping itu peluang kerjasama dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM Orang Asli Papua untuk menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan. Melalui SHEK dengan BGN, Pokja Produktif memperoleh informasi tentang jumlah



kebutuhan bahan baku MBG dimasing-masing SPPG setiap hari dan berdasarkan data tersebut maka Pokja Produktif akan melakukan akselerasi kegiatan dengan Instansi Teknis yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua dan Kabupaten Nabire dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar mutu, kontinuitas produksi, dan ketepatan waktu pengiriman. Langkah kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penyerapan tenaga kerja hasil pantau dan berdasarkan data di SPPG Bumiwonorejo 001 jumlah tenaga kerja secara keseluruhan 50 orang (Laki-laki :17 dan Perempuan : 33) sebagai rincian karyawan Non OAP berjumlah 22 orang (L : 5 P: 17) sedangkan Karyawan OAP berjumlah 19 orang (L : 8 P : 11).



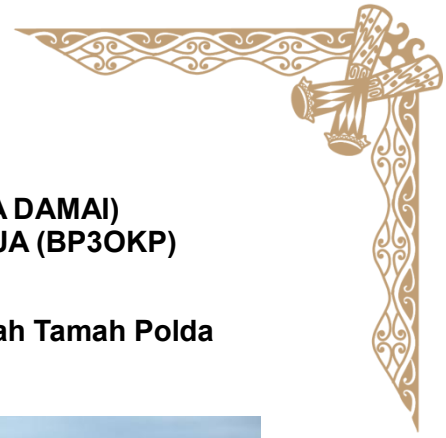
BPP

LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA POLHUKAM

BULAN JULI 2026

BADAN PENGARAH PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH





LAPORAN BULANAN POKJA PAPUA POLHUKAM (PAPUA DAMAI) BADAN PENGARAH PERCEPATAN OTONOMO KHUSUS PAPUA (BP3OKP)

1. Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 Polri Dan Kegiatan Ramah Tamah Polda Papua Tengah – 1 Juli 2026

A. Latar Belakang dan Tujuan

Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara pada 1 Juli 2026 yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat" menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif. Mengingat stabilitas Politik, Hukum,



dan Keamanan (Polhukam) merupakan fondasi utama bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, kehadiran Kelompok Kerja (POKJA) Papua Polhukam mewakili BP3OKP dalam peringatan ini memiliki peran yang sangat strategis.

Keikutsertaan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan dan ucapan selamat secara langsung kepada institusi Polri, meningkatkan sinergitas, koordinasi, serta kolaborasi antara BP3OKP dan Polri, sekaligus membangun komunikasi strategis dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu Polhukam guna mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2026, mulai pukul 07.30 WIT sampai dengan selesai. Kegiatan terbagi ke dalam dua lokasi utama di Kota Nabire, yaitu Lapangan Gubernur Bandara Lama untuk pelaksanaan upacara utama dan Aula Wicaksana Laghawa sebagai tempat berlangsungnya acara syukuran serta ramah tamah.

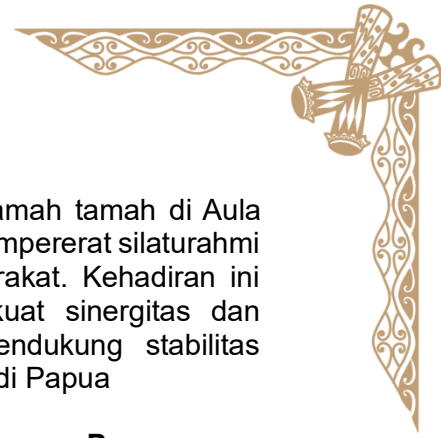
B. Peserta

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim POKJA Papua Polhukam BP3OKP Christoforus Valentino AP, S.H., M.H. yang hadir secara resmi untuk mewakili Pimpinan BP3OKP. Selain perwakilan dari BP3OKP, acara ini diikuti oleh Kapolda Papua Tengah sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara Brigjen Pol. Jermias Rontini, segenap Jajaran Pejabat Utama (PJU) Polri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dan tamu undangan

C. Hasil Yang Dicapai

Melalui keikutsertaan dalam rangkaian kegiatan ini, Tim POKJA Papua Polhukam BP3OKP berhasil mengikuti seluruh jalannya upacara peringatan yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Jermias Rontini secara khidmat, tertib, dan lancar dengan penekanan pada amanat komitmen "Polri untuk Masyarakat" serta menjaga keamanan di tanah Papua.





Selain itu, perwakilan BP3OKP memanfaatkan sesi ramah tamah di Aula Wicaksana Laghawa untuk melakukan dialog informal dan mempererat silaturahmi dengan jajaran PJU Polri, Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Kehadiran ini memberikan dampak positif yang nyata dalam memperkuat sinergitas dan kemitraan strategis antara BP3OKP dan Polri guna mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Papua

2. FGD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terkait Rencanan Penyusunan Rancangan Pergub Pelaksanaan Perda Provinsi Papua Tengah No 12 Tahun 2026 Tentang Pengembangan, Pembinaan Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Sastra Daerah. – 1 Juli 2026

A. Latar Belakang Dan Tujuan

Bahasa dan sastra daerah merupakan kekayaan kultural dan identitas bangsa yang harus dijaga kelestariannya di Provinsi Papua Tengah, yang telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan



Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Guna memastikan efektivitas implementasi regulasi tersebut di tingkat operasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menginisiasi *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyusun Peraturan Gubernur (PERGUB) sebagai petunjuk pelaksanaan.

Keikutsertaan BP3OKP dalam FGD ini bertujuan untuk membangun serta memperkuat sinergitas kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sekaligus memberikan telaah, pandangan, dan masukan konstruktif agar materi muatan Rancangan PERGUB yang selaras dengan semangat Otonomi Khusus serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat

B. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2026, yang diselenggarakan secara *hybrid* berpusat di Aula kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di Nabire.



C. Peserta

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah ini dihadiri oleh Christoforus Valentino, S.H., M.H., selaku perwakilan Pokja Polhukam BP3OKP Provinsi Papua Tengah. Selain itu, forum ini diikuti secara daring dan luring oleh berbagai instansi terkait, seperti perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Papua (Bapak Merdeka Putra dan Bapak Manutur Simbolon), Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua (Ibu Valentina Lovina Tanate, M.Hum.), Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah Bapak John Gobai Beserta Ibu, serta jajaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.



D. Hasil Yang Dicapai

Melalui pelaksanaan FGD ini, diperoleh berbagai masukan strategis yang mencakup pembahasan teknik penyusunan hukum dari Kanwil Kemenkum RI Provinsi Papua agar draf PERGUB tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, gambaran kerangka kerja perlindungan bahasa yang sesuai kondisi sosiologis masyarakat oleh Balai Bahasa Provinsi Papua, serta peninjauan latar belakang filosofis pembentukan PERDASI oleh pimpinan DPRP Papua Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Pokja Polhukam BP3OKP memberikan asistensi berupa pokok-pokok pikiran agar rumusan teknis PERGUB mampu mengakomodasi nilai kearifan lokal serta sejalan dengan *grand design* percepatan pembangunan Papua di sektor sosial-budaya. Hasil diskusi lintas sektoral ini berhasil menyempurnakan landasan materiil dan formil draf Rancangan PERGUB sebelum melangkah ke tahap fasilitasi, harmonisasi lanjutan, dan penetapan.



3. FGD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Terkait Bantuan Pembangunan Asrama di Distrik Moora

A. Latar Belakang

Focus Group Discussion (FGD) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dengan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) beserta dengan pihak-pihak berkepentingan dan pengambil kebijakan terkait pembangunan asrama di Distrik Moora. FGD ini dilaksanakan guna membahas rencana pemberian bantuan renovasi asrama siswa di Distrik Moora. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan, membahas mekanisme penyaluran bantuan, serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan agar program bantuan asrama dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2026, yang diselenggarakan secara Luring berpusat di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Papua Tengah.



C. Peserta

Peserta yang hadir diantaranya:

1. Perwakilan BP3OKP Sekretariat Provinsi Papua Tengah (Pokja Papua Produktif & Pokja POLHUKAM)
2. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah
3. Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire
4. Perwakilan Pemerintah Distrik Moora
5. Kepala Sekolah SMP N 1 Moora & Pengelola Asrama
6. Perwakilan Instansi Teknis Terkait



D. Hasil Yang Dicapai

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menyetujui usulan pengalokasian anggaran bantuan bagi asrama siswa asal Distrik Moora. Pihak sekolah (SMP N 1 Moora) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire diminta segera melengkapi data riil jumlah siswa penerima manfaat, inventarisasi fasilitas, serta dokumen pendukung guna memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

4. Laporan Kegiatan Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Dan Koordinasi (SHEK) BP3OKP Provinsi Papua Tengah Dengan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Papua Tengah – 9 Juli 2026

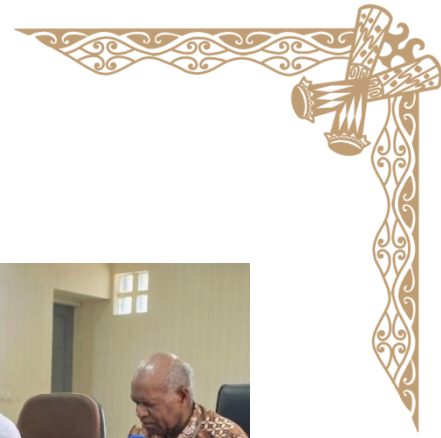
A. Latar Belakang dan Tujuan

Percepatan pembangunan sektor perkebunan dan peternakan di Provinsi Papua Tengah menghadapi tantangan krusial di bidang hukum dan tata regulasi. Hambatan utama meliputi benturan antara perizinan lahan dengan hak ulayat, risiko sengketa aset pada pengadaan lahan UPTD Terpadu, serta disharmoni kebijakan penanganan wabah Flu Babi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Oleh karena itu, kegiatan ini bermaksud dan bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna mengurai kebuntuan hukum perizinan dan status lahan, memitigasi risiko sengketa aset, serta menyinkronkan hierarki produk hukum daerah terkait pengendalian lalu lintas ternak agar tercipta kepastian hukum bagi pelaksanaan program Pembangunan



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan Aula KPPN Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Juli 2026 dengan format pelaksanaan pemaparan materi yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi seputar pelaksanaan program, rencana lanjutan, hasil dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut.



C. Peserta

Kepala BP3OKP Papua Tengah Bersama jajaran Anggota BP3OKP Provinsi Papua Tengah (terdiri dari Pokja Papua Polhukam dan Pokja Papua Produktif) serta perwakilan Kepala Dinas beserta jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah.

D. Hasil yang Dicapai

- Pemetaan Kendala Perizinan Lahan: Teridentifikasinya hambatan lambatnya perizinan akibat benturan hukum agraria dan pengakuan hak ulayat. Secara khusus, program penanaman 1 juta kopi tertahan karena Kabupaten Puncak dan Deiyai belum memberikan konfirmasi penyediaan lahan.
- Evaluasi Aset UPTD Terpadu Peternakan: Diketuinya kendala legalitas pelepasan hak atas tanah untuk perluasan UPTD yang saat ini baru tersedia 4 Ha, untuk menambah luasan perlu mencari lahan tambahan yang saat ini masih diperlukan telaah lebih jauh mengenai ketersediaan lahan, isu hak ulayat dan biaya pembebasan lahan. Jika tidak bisa menemukan titik terang dapat memunculkan kekhawatiran potensi konflik agraria di kemudian hari jika tidak diselesaikan dengan musyawarah adat yang sah.
- Identifikasi Disharmoni Regulasi: Terpetakannya ketidakselarasan interpretasi hukum dan SOP terkait pelarangan/karantina lalu lintas daging babi antara level Provinsi, Kabupaten, dan Otoritas Karantina, yang berdampak pada lonjakan harga daging dan inflasi daerah.
- Rekomendasi Tindak Lanjut Strategis: masukan mengenai langkah-langkah penyelesaian, antara lain pembentukan Satgas terpadu lintas sektor (Pemprov, Pemkab, BPN, Lembaga Adat) untuk penyelesaian lahan, penyusunan kajian strategis pengadaan aset UPTD, dan urgensi penyusunan satu payung hukum terpadu (Perkada/SOP bersama) untuk lalu lintas ternak dan hasil Perkebunan yang menyeimbangkan standar biosekuriti ketat dengan kelancaran distribusi



5. Koordinasi Dan Diskusi Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bersama BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah (14 Juli 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam aspek pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Tengah, diperlukan sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,

salah satunya BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan APBD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel,





efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Maksud kegiatan ini Melaksanakan koordinasi dan diskusi bersama BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah mengenai pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan APBD di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara BP3OKP dan BPKP, menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan Dana Otonomi Khusus, membahas hasil pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan anggaran daerah, mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan, Senin, 13 Juli 2026, pukul 10.00 WIT. Bertempat di aula KPPN Nabire.

C. Peserta

Kegiatan ini dihadiri oleh Pokja BP3OKP Papua Tengah dengan anggota BPKP Provinsi Papua tengah.

D. Rencana Tindak Lanjut

- BP3OKP akan berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah dalam pelaksanaan pengawasan berikutnya.
- Melakukan pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan Dana Otonomi Khusus sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- Menyusun agenda monitoring bersama terhadap program-program strategis yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus.
- Mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan serta memperbaiki tata kelola penganggaran dan pelaksanaan program

6. Laporan Kegiatan Pokja Polhukam Mengenai Tindak Lanjut Pelimpahan Permohonan Audiensi DPRK Puncak Peduli Kemanusiaan Kembru (14 Juli 2026)

A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh dinamika keamanan dan isu kemanusiaan di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, serta sebagai tindak lanjut atas surat pelimpahan permohonan audiensi Pansus DPRK Puncak dari Sekretariat Wakil Presiden kepada BP3OKP Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan koordinasi lintas kelembagaan bersama jajaran kepolisian dan aparat keamanan guna merespons pelimpahan tersebut secara





komprehensif. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data lapangan dan pemetaan intelijen terkini, menyelaraskan langkah strategis antara BP3OKP dan Polda Papua Tengah dalam menangani krisis sosial dan keamanan, serta menyusun bahan laporan tindak lanjut yang komprehensif untuk disampaikan kepada Wakil Presiden RI.

B. Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan:

- **Waktu:** Senin, 13 Juli 2026, pukul 10.00 WIT.
- **Tempat:** Ruang Kerja Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Papua Tengah.



C. Peserta

Dalam Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota Kelompok Kerja (POKJA) POLHUKAM BP3OKP Provinsi Papua Tengah, yang diwakili oleh KOMBESPOL (P) Drs. AJB Maturbongs, S.H. dan Christoforus Valentino, AP., S.H., M.H. Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Papua Tengah beserta jajaran.

D. Hasil yang Dicapai

Adapun hasil yang dicapai Adalah:

- **Sinergitas Kelembagaan:** Berhasil dijalin komunikasi dan sinergi yang solid antara BP3OKP Provinsi Papua Tengah dengan jajaran intelijen keamanan Polda Papua Tengah dalam menyikapi isu di Kembru.
- **Komitmen Penegakan Hukum:** Terdapat komitmen penuh dari Polda Papua Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan pendekatan yang profesional, terukur, dan menjunjung tinggi hukum

7. Laporan Kegiatan BO3OKP – MRP – SKALA Terkait Rencana Kegiatan Penguatan Kapasitas Badan-Badan Otonomi Khusus (21 Juli 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

Penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Tengah menuntut kesiapan kelembagaan yang kuat guna memastikan terwujudnya kesejahteraan, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlindungan bagi masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP). Dalam tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat khusus ini, terdapat lembaga-lembaga afirmasi dan strategis seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jalur Pengangkatan, serta Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Agar lembaga-lembaga tersebut dapat mengawal implementasi kebijakan Otsus secara optimal, menyusun produk hukum daerah yang tepat





sasaran, serta melakukan pengawasan yang efektif, diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas SDM di dalamnya.

Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membangun kesepahaman dan sinergi antara program kemitraan SKALA dengan lembaga-lembaga Otsus di Provinsi Papua Tengah. Selain itu, pertemuan ini bertujuan merumuskan rencana kerja konkret terkait program peningkatan dan penguatan kapasitas bagi pimpinan maupun anggota lembaga-lembaga khusus (MRP, DPRP, DPRK Jalur Pengangkatan, dan BP3OKP).

B. Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026. Tempat pertemuan kegiatan ini berada di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.

C. Peserta

Peserta yang hadir dalam pertemuan ini diantaranya adalah: BP3OKP Pokja Papua POLHUKAM. BP3OKP Pokja Papua Produktif. BP3OKP Pokja Papua Cerdas. Anggota MRP Pokja Adat. Perwakilan dari SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

D. Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan pertemuan ini diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tercapai kesepakatan bersama untuk segera merealisasikan program "Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Badan-badan Otsus di Papua Tengah".
- Sasaran utama dari program penguatan dan peningkatan kapasitas ini adalah anggota dan pimpinan dari lembaga-lembaga yang meliputi: Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Jalur Pengangkatan, DPRK Jalur Pengangkatan, dan BP3OKP.
- Pelaksanaan program penguatan dan peningkatan kapasitas ini akan didukung oleh program kemitraan SKALA, BP3OKP dan MRP beserta berkoordinasi dengan Kementerian terkait.
- Dalam rangka memastikan keselarasan dengan regulasi tata kelola pemerintahan nasional, seluruh rangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh SKALA akan didampingi secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

E. Rencana Tindak Lanjut

- Tindak lanjut dari pertemuan ini akan dibahas bersama selanjutnya dan masing-masing lembaga/badan-badan akan membahas di internal.
- Hasil pembahasan internal tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan membuat susunan Tim Kerja gabungan yang akan melaksanakan kegiatan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja.





8. Kegiatan Pokja Polhukam Mengenai Pendampingan Penyusunan Pandangan Kelompok Khusus Atas LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 – 27 sampai 30 Juli 2026

A. Latar Belakang dan Tujuan

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh surat resmi dari Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRK Mimika yang memohon pendampingan strategis dari BP3OKP dalam penyusunan Pandangan Umum, Pandangan akhir dan Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan rekomendasi yang disusun oleh legislatif tetap selaras dengan arah kebijakan Otonomi Khusus, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Selain itu, pendampingan ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap tata kelola Dana Otsus, sehingga menghasilkan draf rumusan yang objektif, terukur, dan berpihak pada perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).



B. Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-30 Juli 2026 bertempat di Ruang Rapat Poksus dan Ruang Paripurna DPRK Mimika, Timika, Kabupaten Mimika .

C. Peserta

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Tengah diwakili dari Anggota Kelompok Kerja Christoforus Valentino AP., S.H., M.H, bersama jajaran pimpinan dan anggota Kelompok Khusus DPRK Mimika yang total berjumlah 9 orang.



D. Hasil yang Dicapai

Kegiatan ini menghasilkan beberapa manfaat diantaranya:

1. Telah tersusun naskah final Pandangan Umum, pandangan akhir dan Rekomendasi Kelompok Khusus DPRK Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun 2025 yang komprehensif, berbasis data, dan bernilai strategis.



2. Teridentifikasinya sejumlah catatan penting terkait efektivitas serapan dan implementasi Dana Otsus Tahun Anggaran 2025 yang membutuhkan perbaikan tata kelola di tahun mendatang.
3. Terkonsolidasinya sinergi kelembagaan yang semakin solid antara BP3OKP dan Poksus DPRK Mimika dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah.



Publikasi Media

Dalam bulan Juli, publikasi media Badan Pengarah Papua Papua Tengah Adalah sebagai berikut:

1. Instagram

Peringatan Hari Bhayangkara



Kegiatan SHEK Di Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai kerja sama dengan LPKIPI





PENGEMBANGAN UNIT PRODUKSI PETERNAKAN LPKIPI DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Rabu, 1 Juli 2026, BP3OKP menjalankan fungsi pengawasan dalam Kegiatan tindak lanjut pengembangan Unit Produksi **Peternakan Babi** di SMK YPPK Santo Yohanes Pembantus Gayubi, Kabupaten Deiyai. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dengan Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan pendidikan vokasi melalui pembentukan Unit Produksi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini merupakan bagian dari implementasi Papua Produktif yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis praktik, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi sekolah sesuai dengan potensi daerah.

Kegiatan Pertama dilaksanakan di SMK YPPK Santo Yohanes

View insights

Boost post

Liked by   and 7 others

July 3

Add a comment...

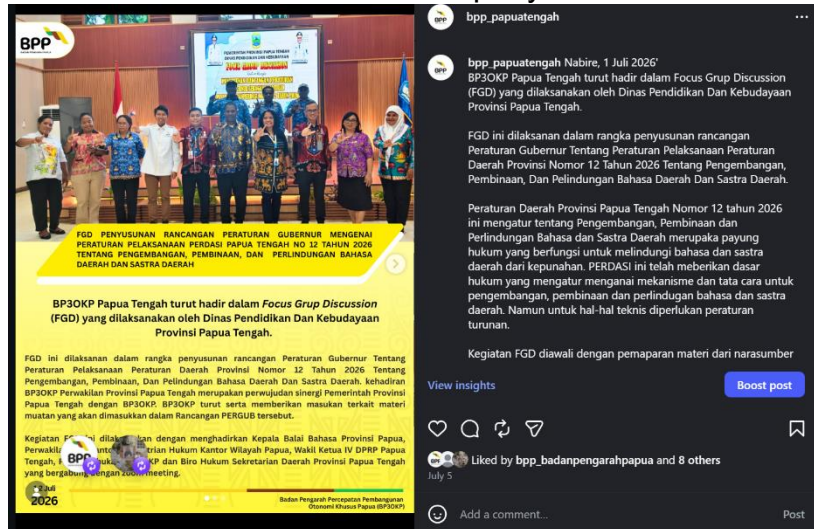
Post



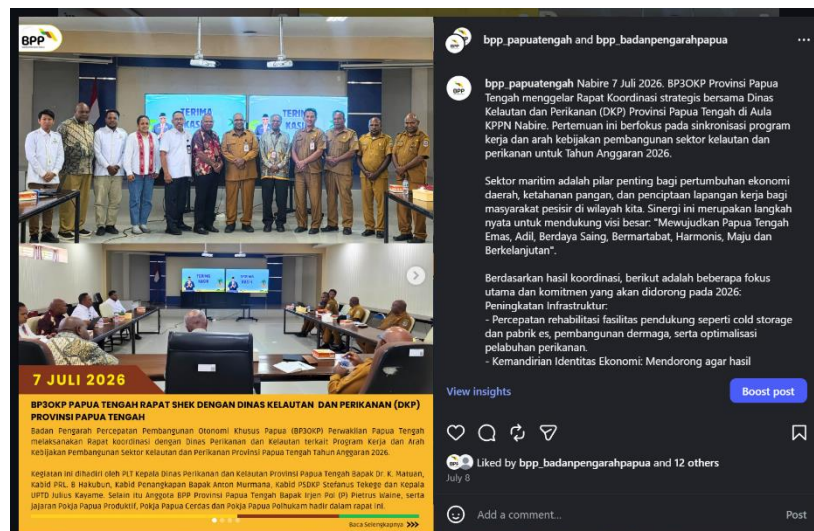
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)



FGD Dinas Pendidikan terkait penyusunan PERGUB



Rapat SHEK dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Tengah



Rapat SHEK dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Prov. Papua Tengah



SHEK BP3OKP PAPUA TENGAH
KEGIATAN SHEK DENGAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH

BP3OKP Papua Tengah melaksanakan rapat S.H.E.K dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Dalam rapat koordinasi ini membahas mengenai program kerja tahun anggaran 2026 beserta evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan setiap program kerja.

Program-program kerja yang menjadi pokok bahasan adalah pemberdayaan masyarakat asli dalam mendorong kemandirian dalam memproduksi barang dan jasa, perbaikan tata kelola koperasi, Pem. BPP dan sumberdaya alam dengan mengembangkan sektor jasa pariwisata, dan program-program kerja unggulan lainnya

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)

bpp_papuatengah and bpp_badanpengarahpapua

bpp_papuatengah 7 Juli 2026.
BP3OKP melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka SHEK tagangan

bpp_papuatengah
AKUN RESMI BPP PAPUA TENGAH

61 posts 61 followers 18 following

im Jan serta irang Asli

Edit profile

View insights

Boost post

♥ Q ↻ ↻

Liked by bpp_badanpengarahpapua and 11 others
July 13

Add a comment... Post



Rapat Koordinasi terkait dengan DIRINTELKAM Polda Papua Tengah



Rapat SHEK dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah





Anggota BPP Papua Tengah menghadiri Undangan Rapat Paripurna LKPJ Provinsi Papua Tengah

BP3OKP PAPUA TENGAH MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD PAPUA TENGAH TERHADAP LKPJ PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Papua Tengah atau Kepala BP3OKP Provinsi Papua Tengah Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine, SH, MHum menghadiri Paripurna Penyampaian rekomendasi DPR Provinsi Papua Tengah terhadap LKPJ Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan BP3OKP menjadi kunci utama dalam merumuskan langkah perbaikan dan menyempurnakan program kerja pemerintahan ke depan.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal jalannya Otonomi Khusus (Otsus), BP3OKP memiliki mandat penting dalam melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi program percepatan pembangunan di Tanah Papua. BP3OKP berfungsi sebagai 'kompas' yang memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras dan tepat sasaran.

bpp_papuatengah

bpp_papuatengah Sinergi Kawal Pembangunan: BP3OKP Hadiri Paripurna LKPJ Papua Tengah

Pada tanggal 15 Juli lalu, Anggota Badan Pengarah Papua perwakilan Provinsi Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine, secara resmi menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah.

Berdasarkan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Papua Tengah, Delius Tabuni, ditegaskan bahwa rekomendasi dewan bukanlah sekadar formalitas. Evaluasi ini merupakan instrumen strategis yang mendesak Pemerintah Daerah untuk:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
- Memastikan setiap program kerja dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
- Menjaga agar seluruh perencanaan dan pembangunan di

View insights

Boost post

Liked by nihgunia_mote and 4 others

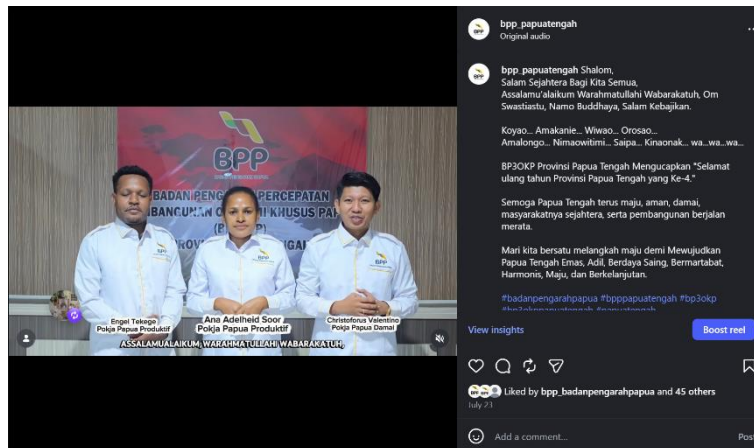
July 19

Add a comment...

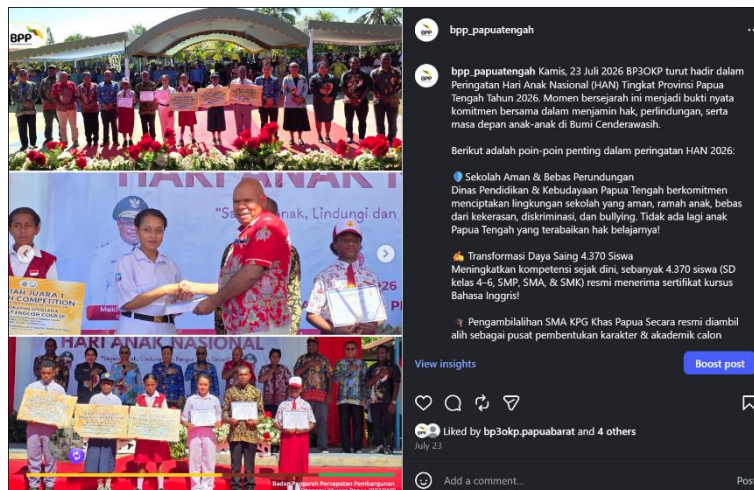
Post



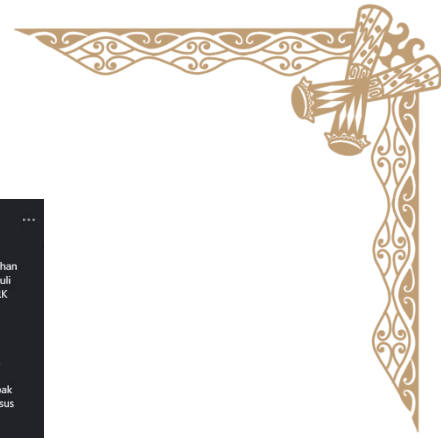
Publikasi Ucapan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Tengah yang Ke-4



Kegiatan Hari Anak Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah



Pendampingan penyusunan Pandangan umum dan Rekomendasi Kelompok Khusus DPRK Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2026



Peresmian dan serah terima fasilitas Kantor baru BPP Papua Tengah beserta perabotannya



2. Publikasi Website





<https://badanpengarahpapua.go.id/2026/07/sinergi-pengawasan-otsus-bp3okp-papua-tengah-dan-kelompok-khusus-dprk-mimika-kolaborasi-susun-pandangan-umum-dan-rekomendasi-lkpi-2025/>



<https://timikainfo.id/bp3okp-dan-kelompok-khusus-dprk-mimika-perkuat-pengawasan-pelaksanaan-otsus/>